

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usia muda adalah masa yang penuh gejolak, masa dimana rasa ingin tahu dan petualangan terhadap sesuatu yang baru sangat tinggi. Pada masa ini seyogyanya dimanfaatkan dengan hal-hal positif untuk mempersiapkan kehidupan di masa depan mereka kelak. Dewasa ini generasi muda menghadapi lingkungan sosial yang sangat berbeda daripada orangtuanya. Perubahan sosial budaya membuat generasi muda kita saat ini lebih bebas mengekspresikan dirinya, dan telah mengembangkan kebudayaan dan bahasa khusus antara grup dan kalangan sebayanya. Sikap-sikap kaum muda atas seksualitas dan soal seks pun ternyata juga lebih liberal daripada orangtuanya, dengan jauh lebih banyak kesempatan mengembangkan hubungan lawan jenis, berpacaran, sampai melakukan hubungan seks.

Penelitian yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dilakukan di 12 provinsi menunjukkan hal yang mengkhawatirkan, 93,7% diketahui pernah berciuman hingga petting (bercumbu), 62,7% pelajar SMP sudah tidak perawan, 21,2% pelajar SMA pernah melakukan aborsi. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa 32% pemuda berusia 14-18 tahun pernah berhubungan seks, bahkan 21,2% pemuda putri pernah melakukan aborsi, 97%, rata-rata penyebab utama pemuda melakukan seks yaitu pengaruh dari internet.

Sedangkan berdasarkan survei yang dilakukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2016) bahwa di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi menunjukkan bahwa dari 100 pemuda yang di survei terdapat 51 pemuda telah melakukan hubungan seksual. Selain di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi, hasil survei yang sama juga diperoleh di wilayah lain di Indonesia seperti, di Surabaya pemuda yang melakukan hubungan seks mencapai 54 persen, Bandung 47 persen, dan Yogyakarta 37 persen. Hal ini tentu saja sangat mencemaskan, karena kasusnya cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun-ke tahun.

Pergaulan yang mendekati seks bebas di kalangan pemuda banyak sekali dampak negatif yang di timbulkan baik bagi individu yang melakukannya maupun keluarga serta lingkungannya. Secara umum menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2010) terdapat dua dampak yang ditimbulkan dari perilaku seks di kalangan pemuda yaitu kehamilan dan penyakit menular seksual (*health risk*), selain itu terputusnya pendidikan, dan perilaku aborsi juga merupakan dampak yang ditimbulkan dari perilaku seks bebas ini. Kejadian seks bebas dan kehamilan sebelum menikah terjadi hampir di seluruh daerah dan pada semua kelas sosial dan latar belakang etnis (Utomo et al., 2010).

Provinsi Jawa Timur sendiri merupakan salah satu provinsi dengan persentase perempuan yang usia perkawinan pertama kurang dari 17 tahun yang cukup tinggi. Bahkan angka tersebut di atas rata-rata nasional. Data yang dirilis Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur pada tahun 2016 menunjukan bahwa pemuda di jatim yang menikah dini di angka 53 per 1000 penduduk, sementara angka rata-rata nasional 48 per 1000. Data Badan Pusat Statistik (2017) juga menunjukan persentase perempuan di provinsi Jawa Timur yang usia perkawinan pertama kurang dari 17 tahun rata-rata mencapai 21,16 perbulan, sebagian pernikahan tersebut disebabkan karena kehamilan yang tidak diinginkan (di luar nikah).

Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan, dengan mengutip data yang diambil berdasarkan surat keterangan permintaan “*dispensasi*” menikah di bawah umur ke Pengadilan Agama Jawa Timur, tercatat jumlah perempuan di bawah usia 16 tahun yang menikah karena disebabkan kehamilan mencapai 5.000 orang (Pengadilan Agama Jawa Timur, 2016). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sendiri menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai

umur 16 tahun. Namun Undang-undang ini juga memungkinkan adanya dispensasi bagi anak perempuan dan anak laki-laki untuk menikah lebih awal dengan sebab kehamilan, peraturan tersebut banyak dilanggar terutama di daerah pedesaan atau daerah terpencil.

Permasalahan inilah yang menjadi salah satu yang menjadi fokus dalam penelitian ini, karena berbagai kajian literatur telah menunjukkan bahwa ada hubungan yang kompleks antara perkawinan usia dini, tingkat perceraian serta meningkatnya fenomena prostitusi di kalangan pemuda. Hasil penelitian yang dilakukan Gavin Jones & Bina Gubhaju (2008) dari National University of Singapore (NUS) dengan judul "*Trends in Age at Marriage in Provinces of Indonesia*" menemukan bahwa penyebab pernikahan lebih awal atau pernikahan sebelum usia 18 tahun merefleksikan pernikahan yang telah diatur atau disebabkan karena kehamilan di luar nikah pernikahan, kejadian ini pada umumnya sangat sering terjadi pada perempuan yang tinggal di kawasan pedesaan.

Pernikahan sebenarnya merupakan ikatan sakral antara pasangan pria dan perempuan yang diakui secara sosial untuk membangun keluarga, melegalkan hubungan seksual, melegitimasi dan membesarkan anak, membagi peran antar pasangan. Pernikahan juga dimaksudkan untuk membina hubungan yang langgeng antara kedua pasangan, sehingga dalam menjalani perkawinan dibutuhkan kedewasaan dan tanggung jawab baik secara fisik maupun mental. Harapan tersebut tentu saja berbeda jika pernikahan dilakukan di usia muda apalagi belum cukup umur terutama adalah bagaimana mereka dalam menghadapi permasalahan rumah tangga misalnya dalam hal keuangan, masalah kebiasaan, masalah anak yang harus dirawat dan dibesarkan dan lain sebagainya, kondisi menjadi penyebab utama tingginya angka perceraian di kalangan pasangan muda

yang belum dewasa betul dalam memutuskan hidup berumah-tangga (Suyanto, 2010).

Pernikahan dini ini tentu saja sangat rentan konflik, karena disebabkan belum matangnya psikologi, mental, dan rohani pasangan muda sehingga perceraian menjadi semacam jalan keluar yang dianggap paling efektif yang dipilih (Sedyaningsih, 2010), pertengkaran, percekocokan, dan konflik berkepanjangan, pada akhirnya berujung pada perceraian. Pendapat tersebut didukung data Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (2017) menyatakan bahwa tingkat perceraian pada perempuan yang melakukan perkawinan pertama pada usia anak lebih tinggi dibandingkan perempuan yang melakukan perkawinan pertama pada usia dewasa.

Menyandang status sebagai ‘perempuan yang pernah bercerai’ di Indonesia merupakan beban yang cukup berat, stigma buruk masyarakat pada perempuan yang berstatus demikian menjadikan mereka tidak leluasa beraktivitas secara sosial maupun ekonomi. Selain itu, sebagian besar orang tua tunggal para perempuan ini harus bertanggung-jawab atas perekonomian keluarga termasuk pendidikan dan pengasuhan anak-anaknya. Beban ini tentu saja tidak mudah dijalani karena bagi para perempuan yang menikah di usia muda, karena pada umumnya mereka tidak memiliki keahlian maupun pendidikan yang cukup untuk masuk ke pasar kerja (Anshor, 2016). Tekanan ekonomi serta tuntutan kebutuhan membuat sebagian dari mereka rela melakukan apa saja agar bisa mendapatkan suatu imbalan berupa uang atau apapun yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan atau keinginan mereka termasuk melakukan tindakan pelacuran atau prostitusi.

Pendapat tersebut tentu beralasan, dalam penelitiannya Sedyaningsih (2010) menemukan bahwa pernikahan dini yang kemudian diakhiri dengan perceraian mempunyai kontribusi signifikan terhadap banyaknya perempuan pekerja seks yang menghuni kompleks prostitusi. Praktik pelacuran dalam banyak hal dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial budaya yang terjalin erat satu dengan yang lain: seperti kemiskinan, kebiasaan kawin muda, kebiasaan cerai, dan status sosial perempuan yang relatif rendah juga merupakan faktor pendorong kenapa perempuan melacurkan diri (Sedyaningsih, 2010).

Walau tidak selalu paralel, tetapi indikasi bahwa pernikahan dini yang potensial berakhir dengan perceraian menurut Irwanto (1999) akan mendorong kemungkinan terjadinya *“janda-janda yang belum cukup umur”* itu lari dan terjerumus pada dunia prostusi. Bagong Suyanto (2012) dalam studi yang dilakukannya misalnya menemukan bahwa salah satu pendorong remaja perempuan bekerja sebagai pekerja seks komersial karena mereka tidak lagi nyaman bergaul dalam lingkungan masyarakat yang menstigma mereka sebagai *“gadis yang sudah tidak lagi perawan”*. Terlebih ketrampilan sebagai pelacur itu tidak hanya dimonopoli oleh perempuan tuna susila saja, tetapi dapat dipelajari dengan mudah oleh setiap perempuan dalam waktu relatif pendek (Kartono, 1992), di samping itu berkembangnya tempat-tempat hiburan malam atau pesona bisnis remang-remang maka semakin memudahkan seseorang mengambil keputusan menjadi pelacur.

Seks bebas yang berujung kepada perilaku prostitusi di kalangan generasi muda bisa jadi seperti fenomena gunung es, makin ke bawah kian membesar dan meluas, yang kita lihat hanya permukaanya saja. Belum kita lihat terintegrasinya berbagai kebijakan nasional dan daerah terlihat belum terintegrasi, serta belum ada pemahaman yang sama dan kerangka kebijakan yang lebih menyeluruh

diantara pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah terhadap penanganan masalah sosial terutama yang berhubungan dengan anak, perempuan dan pemuda. Pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial telah menargetkan Indonesia Bebas Prostitusi pada tahun 2019, dalam kurun waktu 4 tahun (2013-2107) sudah ditutup sebanyak 118 lokalisasi dari total 168 lokalisasi prostitusi di Indonesia dimana 42 diantaranya berada di Jawa Timur. Menurut data Kemensos, sisanya ditargetkan sampai tahun 2019 seluruh lokalisasi prostitusi akan ditutup (Kemensos, 2018).

Ditutupnya lokalisasi di beberapa wilayah di Jawa Timur tersebut ternyata tidak efektif untuk menekan perilaku prostitusi. Pendekatan persuasif, langkah antisipasi dan pemberdayaan masyarakat sudah pasti telah dilakukan oleh pemerintah, namun sampai sekarang belum dapat mengatasi keseluruhan masalah yang muncul setelah kebijakan penutupan lokalisasi ini diterapkan (Ginanjari, 2018). Paska penutupan lokalisasi banyak pekerja seks menyebar, entah sendiri-sendiri ataupun dengan kelompok-kelompok kecil, pada realitasnya pekerja seks masih ada dan tetap melakukan transaksi seksual. kondisi tersebut membuat intervensi program-program pemerintah khususnya kesehatan pada kelompok pekerja seks dan pelanggannya menjadi semakin sulit. Pemerintah berharap pembubaran lokalisasi membuat pekerja seks hilang, padahal dalam kenyataannya tidak.

Kondisi ini persis seperti dikemukakan oleh Winter (Dalam Alam, 1984) bahwa di beberapa negara sering ada hubungan kausal antara penutupan rumah-rumah bordil dengan meningkatnya pelacuran terselubung. Pernyataan tersebut tampaknya juga berlaku di Jawa Timur, mulai saat penutupan Dolly atau Gang Dolly yaitu lokasi pelacuran yang berada di sebuah kawasan lokalisasi prostitusi yang terletak di daerah Jarak, Pasar Kembang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dimana konon terbesar di Asia Tenggara, lebih besar dari Patpong di

Bangkok Thailand dan Geylang di Singapura, yang kemudian diikuti penutupan lokalisasi lainnya praktik “*prostitusi online*” atau daring menunjukkan trend yang semakin meningkat. Kondisi ini didukung meningkatnya penggunaan HP dan internet dan media sosial seperti *Facebook* (FB), *WhatsApp*, *Twitter*, *Blackberry Messenger* (BBM) dan media sosial lainnya membuat gairah prostitusi online semakin bersinar. Saat ini sering sekali kita perhatikan di kota-kota besar seperti di Surabaya, Malang dan kota-kota besar di Jawa Timur lainnya pemberitaan di media massa sering terjadi razia perilaku prostitusi online melalui media daring di hotel, diskotik dan tempat-tempat hiburan lainnya yang paling sering tertangkap adalah anak muda bahkan banyak yang masih berstatus pelajar.

Perkembangan teknologi komunikasi terutama internet ini bahkan telah memfasilitasi dan meningkatkan mobilitas perilaku prostitusi ini dalam skala, jenis dan lingkup yang lebih luas. Perkembangan teknologi internet telah memungkinkan pariwisata seks dalam bisnis seks online telah memunculkan berbagai modus dan perilaku prostitusi dengan jenis bervariasi dan sulit dikontrol. Pemanfaatan media online dalam bisnis prostitusi ini mempersulit gerak aparat pemerintah untuk menangkap jaringan nya karena para mucikari dan pekerja seks komersial dapat melakukan “*mobilitas geografi virtual*”, tanpa harus berhubungan lokasi, tempat transaksinya juga banyak dilakukan di apartemen, hotel, kost-kostan dan tempat privat lain sehingga sering lepas dari pengawasan petugas (Utami, 2017).

Kebijakan pemerintah sendiri dalam penanganan masalah seks bebas dan perilaku prostitusi masih terlihat lebih banyak mengambil kebijakan represif dan cenderung tidak memanusiakan para pelakunya, apalagi mereka ini rata-rata berusia muda. Para pelaku dianggap layaknya seorang kriminal atau pelaku tindak kejahatan. Para perempuan pekerja seks yang terjaring ini kemudian sebagian

besar dipulangkan ke daerah asalnya atau dilakukan pembinaan. Atas dasar desakan ekonomi, minimnya keterampilan, rendahnya pendidikan, faktor mental, dan sikap membuat sebagian pekerja seks pemuda ini kembali melakukan praktik serupa. Dengan memperlakukan mereka sebagai bagian dari kehidupan kriminal yang berperilaku menyimpang, untuk sebagian mungkin akan membuat kita sebagai pembuat kebijakan merasa telah selesai berbuat sesuatu, karena dengan bersikap demikian dapat dihindari kesulitan untuk membuat program intervensi yang rumit dan bertele-tele. Padahal setiap kebijakan yang dilakukan harus didasari oleh hati nurani, sikap empati, dan komitmen. Tanpa dilandasi dan dipandu ketiga hal ini maka jangan heran jika nasib pemuda yang terjerat perilaku seks bebas dan prostitusi tidak akan pernah terselesaikan sampai ke akar-akarnya.

Para pemuda yang terjerat perilaku seks bebas dan prostitusi ini sesungguhnya harus dipahami sebagai korban dan fenomena yang timbul sebagai efek samping daripada perubahan sosial. Pada saat ini pada umumnya hampir di semua masyarakat terjadi orang untuk menunda perkawinan, akan tetapi fakta bahwa telah terjadi pernikahan di bawah umur dilakukan karena akibat pergaulan bebas, sehingga hamil, dan terpaksa kawin untuk menutup aib keluarga. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan dampak yang sangat panjang, atas dasar keprihatinan inilah yang menjadi latar belakang kajian ini menjadi sangat menarik untuk dilakukan, terlebih masih sangat jarang penelitian ataupun literatur yang mengkaji fenomena meningkatnya seks bebas dan prostitusi terutama yang terjadi pada masyarakat pedesaan.

Sampai saat ini terlihat bahwa pembinaan, pengawasan dan pencegahan oleh pemerintah belum efektif dalam menyelesaikan persoalan meningkatnya perilaku seks bebas dan prostitusi di kalangan generasi muda ini. masih terlihat bahwa masalah sosial terkait prostitusi ini adalah masalah daerah asal yaitu

tempat daerah pekerja seks berasal. Kebijakan antar daerah dalam penanganan masalah sosial terutama yang berhubungan dengan pemuda, perempuan dan anak juga belum terintegrasi dan belum memiliki pemahaman yang sama sehingga belum terumuskan ke dalam sebuah paket kebijakan yang lebih menyeluruh. Dengan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap fenomena sosial ini diharapkan akan diperoleh alternatif kebijakan yang tepat, karena masa depan bangsa Indonesia sangatlah ditentukan oleh para generasi muda ini.

1.2 Rumusan Masalah

- a) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab meningkatnya perilaku seks bebas di kalangan generasi muda di Jawa Timur?
- b) Bagaimana dampak dari meningkatnya perilaku seks bebas kalangan generasi muda serta kaitanya dengan meningkatnya praktik prostitusi di Jawa Timur?
- c) Bagaimana kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mencegah meningkatnya perilaku seks bebas & prostitusi di kalangan generasi muda di Jawa Timur?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

- a) Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya hubungan seks bebas di kalangan generasi muda di Jawa Timur
- b) Untuk menganalisis dampak dari seks bebas apabila dikaitkan dengan meningkatnya praktik prostitusi di kalangan generasi muda di Jawa Timur
- c) Untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang lebih efektif dalam mencegah meningkatnya fenomena seks bebas & prostitusi di kalangan generasi muda di Jawa Timur

1.4 Hasil Yang Diharapkan

- a) Teridentifikasinya faktor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya hubungan seks bebas di kalangan generasi muda di Jawa Timur.
- b) Teridentifikasinya dampak dari seks bebas apabila dikaitkan dengan meningkatnya praktik prostitusi di kalangan generasi muda di Jawa Timur.
- a) Terumuskanya kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang lebih efektif dalam mencegah meningkatnya fenomena seks bebas & prostitusi di kalangan generasi muda di Jawa Timur.

1.5 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pencegahan oleh pemerintah daerah baik itu Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota agar lebih efektif dalam menyelesaikan persoalan meningkatnya perilaku seks bebas dan prostitusi di kalangan generasi muda. Penutupan lokalisasi juga masih belum menjamin wilayah Jawa Timur bebas prostitusi, bahkan saat ini jenis, ragam dan pola transaksi semakin bervariasi. Kajian terkait perilaku seks bebas dan prostitusi serta penyebab dan dampaknya yang ditimbulkan terutama kepada generasi muda yang ada di pedesaan juga masih sangat jarang dilakukan, dengan dasar inilah penelitian ini menjadi menarik untuk dilakukan. Apalagi pada saat ini masih terlihat belum terlihat terintegrasinya berbagai kebijakan nasional dan daerah, serta belum ada pemahaman yang sama dan kerangka kebijakan yang lebih menyeluruh diantara aparatur pemerintah di tiap level, masyarakat dan lembaga lainnya, sehingga kebijakan dalam penanganan masalah sosial yang berhubungan dengan pemuda, perempuan dan anak selalu tidak efektif.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup atau batasan kegiatan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya hubungan seks bebas di kalangan generasi muda saat ini serta dampaknya yang ditimbulkan, serta hubungannya dengan tingginya angka perilaku prostitusi di kalangan generasi muda yang saat ini semakin marak terjadi. Fenomena ini didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi seperti HP, internet dan media sosial lainnya yang telah memfasilitasi dan meningkatkan mobilitas perilaku seks bebas dan prostitusi dalam skala, jenis dan lingkup yang lebih luas ragamnya sehingga semakin sulit untuk dikontrol.

Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Mojokerto sendiri tidak bertujuan untuk mengeneralisir (sebagaimana penelitian kuantitatif) bahwa fenomena prostitusi di kalangan pemuda sangat tinggi di kedua daerah tersebut akan tetapi untuk mengungkap fakta bahwa fenomena perilaku seks bebas dan prostitusi menunjukkan fenomena yang mengkhawatirkan hampir di semua wilayah di Jawa Timur baik di wilayah perkotaan akan tetapi juga terjadi di pedesaan. Dalam pelaksanaan penelitian peneliti berusaha membawa sedikit mungkin asumsi, karena tujuan penelitian ini sendiri tidak hanya menguraikan atau menjelaskan, akan tetapi mengonseptualisasikan, serta berupaya keras untuk menghasilkan dan mengembangkan rekomendasi kebijakan terkait fenomena perilaku seks bebas dan prostitusi merupakan fakta yang tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan akan tetapi juga terjadi di pedesaan, terlebih dengan perkembangan teknologi komunikasi yang memungkinkan semua orang tidak hanya di perkotaan akan tetapi di pedesaan pun mendapatkan akses informasi yang lebih luas melalui internet.